

Judul : Pemerintah Diminta Tingkatkan Sistem Pengendalian Internal
Tanggal : Rabu, 12 Maret 2014
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pemerintah Diminta Tingkatkan Sistem Pengendalian Internal

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta setiap lembaga memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Ketua BAKN Sumarjati Arjoso mengatakan, lemahnya SPIP menjadi akar permasalahan terjadinya penyimpangan pertanggungjawaban keuangan negara.

Tahun 2013, BAKN melakukan investigasi terhadap dua program pemerintah yaitu program tunjangan profesi guru dan program subsidi pupuk. Investigasi BAKN atas kedua program ini didorong oleh banyaknya keluhan masyarakat atas pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Masyarakat mengeluhkan banyak yang tidak beres dari dua program itu. Guru-guru masih sering terlambat menerima uang tunjangan profesi. Berdasarkan hasil investigasi, kurang tertibnya tata kelola program profesi guru menyebabkan adanya sisa dana tunjangan profesi guru yang mengendap hingga Rp 56 triliun di kas daerah seluruh Indonesia.

Hal ini, menurut Sumarjati, bisa menjadi salah satu potensi terjadinya penyalahgunaan uang negara. Uang tersebut sudah berada di kas daerah masing-masing, namun tidak segera sampai kepada guru. Jika tidak diawasi secara ketat, dana tersebut bisa menjadi salah satu celah potensi untuk korupsi.

"Dananya sudah ada di pemerintah daerah. Dana sebesar itu kalau pengawasannya tidak jelas ada peluang untuk dikorupsi. Kita mengharapkan adanya



● Sumarjati Arjoso
Ketua BAKN DPR RI

sistem pengendalian internal di setiap kementerian dan lembaga," katanya.

Pencairan tunjangan profesi guru untuk Tahun Anggaran 2012 dan Triwulan I tahun 2013 hampir di seluruh wilayah tidak tepat waktu. Dari hasil investigasi, BAKN juga menemukan guru-guru yang tidak memenuhi syarat namun tetap menerima tunjangan profesi. Ada guru yang menjadi pejabat struktural namun tetap menerima tunjangan profesi guru.

Program tunjangan profesi guru ini ternyata juga cukup menyulitkan guru-guru di daerah terpencil. Banyak di antara mereka yang sulit memenuhi syarat minimal mengajar 24 jam per minggu. Pemerintah, menurut dia, bisa melakukan upaya agar syarat jam mengajar ini bisa dipenuhi.

Bagi guru yang dibawah Kementerian Agama dan sekolah swasta, kondisi ini lebih memprihatinkan. Ada guru yang tidak menerima tunjangan profesi

selama bertahun-tahun. Tunjangan profesi guru yang terhutang di Kementerian Agama per 16 September 2013 sebesar Rp 3.056 triliun dengan jumlah guru 997.676 orang. Jumlah tunjangan terhutang ada di Bimas Islam, Katolik, dan Kristen. Tak ada tunjangan yang terhutang di Bimas Hindu.

Tata kelola program

Masyarakat juga mengeluhkan mengenai program subsidi pupuk. Investigasi BAKN menyebutkan kurang tertibnya tata kelola program subsidi pupuk menyebabkan adanya potensi penyaluran yang tidak tepat jumlah dan sasaran. Volume penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaporkan produsen pupuk juga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga berdampak terhadap perhitungan subsidi.

Dari sisi harga, perhitungan harga pokok pupuk bersubsidi belum dilakukan secara transparan. Informasi mengenai keterse-

daan Pupuk Bersubsidi dan harga eceran tertinggi (HET) nya tidak tersedia.

Akibatnya, penjualan pupuk bersubsidi sering diatas HET. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Hingga akhir 2013, hutang pemerintah kepada BUMN produsen pupuk tercatat Rp 6,6 triliun. Hutang ini cukup mengganggu likuiditas perusahaan.

BAKN DPR RI merekomendasikan kepada Pimpinan DPR RI agar meminta pemerintah dapat menyempurnakan kebijakan yang menjadi akar permasalahan dalam tata kelola program tunjangan profesi guru dan pupuk bersubsidi.

BAKN juga mengingatkan tentang kasus pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Kementerian Kesehatan TA 2008-2011. BAKN memandang hingga saat ini tidak ada proses hukum signifikan yang dilakukan KPK terkait kerugian negara sebesar Rp 468,98 miliar. ● adv